

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI *SOCIOTECNOPRENEUR*

Sari Wulandari¹, Mhd. Dani Habra², Yuni Shara³

^{1,2,3} Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: sariwulandari@umnaw.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a challenge that must be solved by the government, therefore it is necessary to find various solutions so that poverty continues to decrease. One way that can be done is through Sociotechnopreneur. This study aims to analyze poverty alleviation through Sociotechnopreneur. This study is descriptive with a qualitative approach. This study analyzes poverty alleviation using sociotechnopreneur. The results of the study show that poverty alleviation through sociotechnopreneur is one of the best ways. Sociotechnopreneur is able to reduce poverty through increasing MSMEs. Sociotechnopreneur also covers various levels of society so that achievements in poverty alleviation can be achieved.

Keywords: *Sociotechnopreneur; Poverty Alleviation*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu tantangan yang harus dipecahkan oleh pemerintah, maka dari itu perlu dicari berbagai solusi agar kemiskinan terus berkurang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui Sociotechnopreneur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengentasan kemiskinan melalui Sociotechnopreneur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menganalisis pengentasan kemiskinan dengan menggunakan sociotechnopreneur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan melalui sociotechnopreneur adalah salah satu cara terbaik. Sociotechnopreneur mampu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan UMKM. Sociotechnopreneur juga mencakup berbagai kalangan masyarakat sehingga pencapaian dalam pengentasan kemiskinan dapat terlaksana.

Kata Kunci: *Sociotechnopreneur; Pengentasan Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Wirausaha sosial tumbuh dengan cepat seiring dengan keyakinan bahwa kewirausahaan sosial dapat mengatasi masalah-masalah sosial. *Sociopreneurship* merupakan solusi gerakan sosial di bidang ekonomi yang dapat memberikan peluang usaha terutama di daerah pedesaan. Selain perbaikan ekonomi mikro, *sociopreneur* mampu meningkatkan perekonomian nasional. Disinilah, alasan mengapa *sociopreneurship* mampu menjadi solusi, karena selain bersifat *sustainable* pada perekonomian, *sociopreneurship* mampu memberikan solusi efektif dan taktis terhadap permasalahan perekonomian Indonesia (Putri, 2017). Penting bagi suatu negara untuk fokus pada *technopreneurship* untuk mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan *start up* bisnis melalui inovasi teknologi. Melalui *technopreneurship*, suatu negara dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, mengentaskan kemiskinan dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian negara tersebut. Untuk mencapai hasil ini, penting bagi negara berkembang untuk meningkatkan program kewirausahaan dengan menggunakan teknologi dan mendidik masyarakat untuk fokus pada pembangunan negara. Di negara-negara tertinggal, mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan dan dengan diterapkannya *technopreneurship* di daerah-daerah tersebut akan menarik generasi muda untuk mendidik diri sendiri agar dapat berkontribusi lebih pada negara dan menyadarkan pikiran orang lain terhadap inovasi dan kreativitas.

Salah satu perubahan paling signifikan dalam ekonomi global adalah kewirausahaan, yang didefinisikan sebagai minat dalam kegiatan komersial dan ekonomi. Wirausahawan merupakan salah satu penggerak yang menggerakkan perekonomian setiap negara. Lebih banyak pengusaha berarti lebih banyak peluang untuk bidang usaha baru, dan karenanya lebih banyak lapangan kerja akan diciptakan dan diperluas. Ada beberapa pengertian dan implikasi yang terkait dengan istilah “wirausahawan”. Seorang wirausahawan dapat membantu Anda mencapai kemandirian ekonomi atau pemenuhan pribadi dengan melakukan sesuatu yang kreatif. Seorang wirausahawan juga harus memanfaatkan peluang dengan cara-cara baru. Selain itu, seorang wirausahawan memiliki kemampuan untuk memperoleh berbagai sumber daya untuk membangun dan meningkatkan pekerjaan organisasi dan menghasilkan kemungkinan pekerjaan.

Seorang *technopreneur* adalah seorang wirausahawan yang terlibat dalam peran teknologi karena teknologi berperan sebagai katalisator di era digital ini (Pratiwi et al., 2022). Negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Karena rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat sehingga kapitalnya tidak efisien (Rachmawati, 2020). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kemiskinan di Sumatera Utara dan untuk mengetahui cara mengurangi kemiskinan melalui kegiatan *sociotechnopreneur*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian berupa data tingkat kemiskinan, perkembangan UMKM dan model diagram *sociotechnopreneur*. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang mana data yang diperoleh dirangkum dan dipilih kemudian diuraikan dalam bentuk naratif untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan tingkat kemiskinan September 2012-September 2022, secara umum, pada periode Maret 2012–September 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, pengecualian pada September 2013, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Tabel 1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2012 Sampai September 2022

Tahun	Periode	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2012	Maret	29,25	11,96
	September	28,71	11,66
2013	Maret	28,17	11,36
	September	28,6	11,46
2014	Maret	28,28	11,25
	September	27,73	10,96

2015	Maret		28,59	11,22
	September		28,51	11,13
2016	Maret	28,01	10,86	
	September	27,76	10,7	
2017	Maret		27,77	10,64
	September		26,58	10,12
2018	Maret	25,95	9,82	
	September	25,67	9,66	
2019	Maret		25,14	9,41
	September		24,78	9,22
2020	Maret	26,42	9,78	
	September	27,55	10,19	
2021	Maret		27,54	10,14
	September		26,50	9,71
2022	Maret	26,16	9,54	
	September	26,36	9,57	

Sumber: BRIS, 2022

Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Sopah, 2020). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Yusriadi et al., 2020).

Entrepreneurship pada awalnya berkembang dan berasal dari teori Schumpeter pada tahun 1934, dimana *Entrepreneurship* berarti pengusaha baru yang melaksanakan kombinasi baru dalam bidang teknik komersial ke dalam bentuk praktik (Akter et al., 2017). Kata *Entrepreneurship* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “kewirausahaan”. Kata ini juga berasal dari serapan Bahasa Perancis yaitu *entrependre* yang bila dialih bahasakan ke Indonesia berarti “bertanggung jawab”. Wiraswasta/wirausaha berasal dari kata: wira: utama, gagah berani, luhur; usaha: kegiatan produktif (Putri, 2017).

Technopreneurship berasal dari gabungan kata “*technology*” dan “*entrepreneurship*” *Technopreneurship* merupakan proses sinergi dari kemampuan yang kuat pada penguasaan teknologi serta pemahaman menyeluruh tentang konsep kewirausahaan (Putri, 2017). Sudarsih dalam Prosiding KNIT RAMP-IPB mengemukakan bahwa *technopreneurship* adalah proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi nasional.

Progresif ilmu kewirausahaan baik ditinjau dari jumlah kemandirian, kreativitas dan inovasi semakin mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Bahkan hingga seorang *gamer* pun bisa memilih orintasi menjadi profesional dan menghasilkan keuntungan finansial di era digital sekarang ini (Fowosire et al., 2017).

Hal ini tentunya menjadi sangat linier dengan kemutakhiran teknologi komunikasi dan informasi, terutama media yang pada dasarnya tidak lagi tumbuh hanya sebagai alat politik, sosial dan budaya, namun semakin menyatu dengan orientasi ekonomi. Sebuah konsep yang cukup menarik yang baru-baru ini diperkenalkan oleh beberapa pakar di Indonesia yaitu konsep *Socio-Technopreneurship*. *Socio-Technopreneurship* merupakan penggabungan dari tiga kata yaitu *Socio*/sosial/kemasyarakatan, *techno*/teknologi, dan *entrepreneur*/ kewirausahaan. Konsep ini hampir sama dengan *Business-preneurship* hanya saja capaian *business-preneurship* nya menekankan kepada keuntungan semata.

Perjalanan kajian tentang sociopreneurship seolah menapaki jejak panjang transformasi gagasan: dari benih pemikiran idealis hingga menjadi disiplin interdisipliner yang kaya nuansa. Pada awalnya, wacana ini muncul di ujung abad ke-20 ketika sejumlah tokoh mulai mempertanyakan batas antara profit dan misi kemanusiaan. Bill Drayton, pendiri Ashoka pada 1980, misalnya, menyuarakan keyakinan bahwa seorang wirausahawan sosial bisa sama gesit dan pragmatisnya dengan wirausahawan komersial namun menancapkan visinya pada fondasi nilai sosial yang kuat (Muriithi, 2017).

Di awal milenium, para akademisi mulai merumuskan kerangka teoritis untuk menangkap fenomena ini. Pergulatan pertama muncul dalam upaya memisahkan social entrepreneurship dari filantropi murni, yakni tindakan memberi tanpa harapan kembali finansial serta dari kewirausahaan tradisional yang mengejar laba di atas segalanya. Istilah seperti “triple bottom line” bersemi, mengajukan bahwa keberhasilan suatu usaha harus dilihat melalui tiga lensa: dampak sosial (*People*), keberlanjutan lingkungan (*Planet*), dan keuntungan ekonomi (*Profit*).

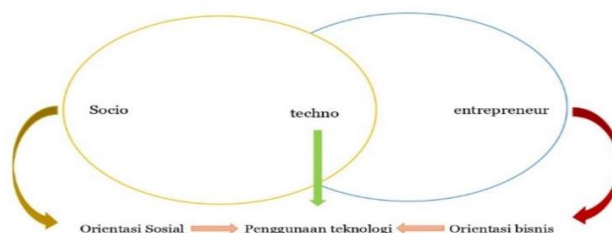
Memasuki dekade 2010-an, penelitian tentang sociopreneurship kian riuh dengan publikasi-publikasi di jurnal khusus, diskusi simposium, dan program studi di universitas-universitas terkemuka. Para peneliti menyorot bagaimana inovator sosial memetakan masalah-masalah kompleks, misalnya kemiskinan perkotaan atau keterbatasan akses pendidikan, lalu meramu model bisnis yang tidak hanya bertahan dari sisi pendanaan, tetapi juga memaksimalkan manfaat komunitas. Di sinilah konsep “hybrid value chain” berkembang, menggambarkan alur penciptaan nilai yang menautkan tujuan sosial dan pasar secara seimbang.

Teknologi digital kemudian menambah dinamika baru. Sekitar pertengahan 2020-an, *platform crowdfunding*, *marketplace* donasi, dan aplikasi pelatihan komunitas menandai babak tech-based sociopreneurship. Para sociopreneur memanfaatkan data besar untuk mengukur dampak, memetakan seberapa dalam intervensi mereka mengangkat kualitas hidup penerima manfaat, serta berkolaborasi lebih intens dengan masyarakat lokal dalam proses “co-creation value”. Angkatan muda, terutama Gen Z yang melek media sosial, turut memercikkan inovasi: kampanye digital demi isu lingkungan, edukasi finansial berbasis game, hingga bank mikro yang dikelola komune online (Rokhman, 2013).

Kini, sociopreneurship berdiri di persimpangan ilmu ekonomi, manajemen, sosiologi, dan kebijakan publik. Setiap penelitian membuka bab baru: bagaimana menghadapi tantangan iklim dengan inovasi hijau, bagaimana menyusun metrik dampak yang akurat tanpa mengorbankan *fleksibilitas inovator*, hingga bagaimana merawat spirit gotong royong di era globalisasi. Dengan semakin terjalinnya kolaborasi lintas disiplin dan platform digital yang semakin canggih.

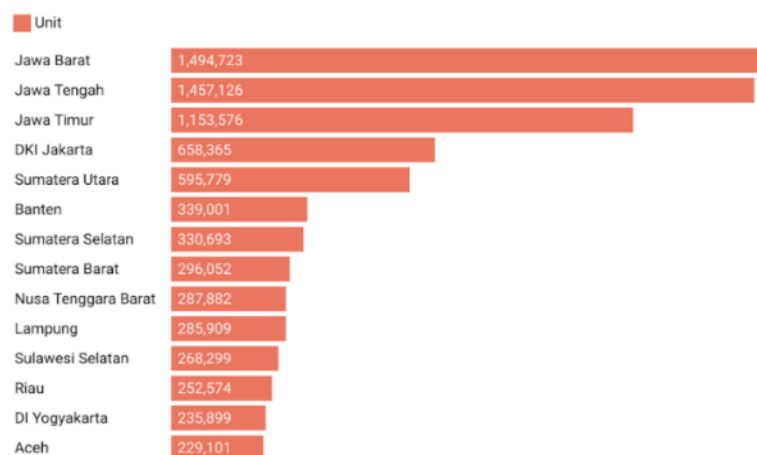
Pengentasan Kemiskinan Melalui Sociotechnopreneur

Orientasi sosial menunjukkan bagaimana seseorang menyadari, berhubungan, dan beradaptasi dengan orang lain, sedangkan pendekatan waktu menunjukkan bagaimana seseorang memandang, mendekati dan mengelola waktu. Dengan menggunakan teknologi sebagai media bagi pengembangan wirausaha, sehingga dapat mengembangkan sebuah usaha. Melalui *Sociotechnopreneur*, tingkat kemiskinan dapat dikurangi.



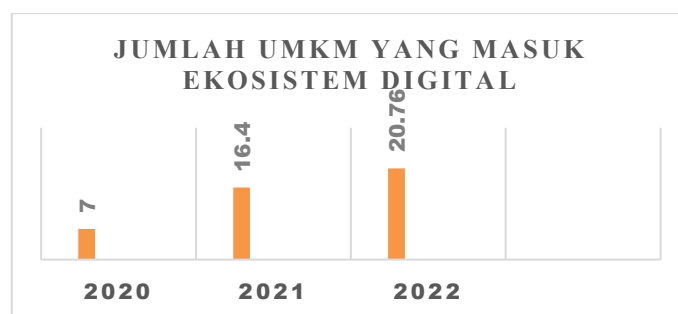
Pada tahun 2021 lalu, pemerintah meluncurkan platform *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA) yang bisa diakses melalui www.oss.go.id. Website ini digunakan sebagai media pendaftaran perizinan usaha di Indonesia bagi pelaku usaha. Hingga 2022, jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 Juta unit dengan persebaran lokasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah UMKM di Indonesia 2022



Sumber: www.ukmindonesia.id

Berdasarkan jumlah UMKM di Indonesia dapat dilihat bahwa UMKM yang mengurus perijinan melalui platform OSS terbanyak di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.494.723 unit, dan yang terkecil berada di Provinsi Papua sebesar 3.932 unit.



Sumber: Kementrian Koperasi dan UMKM

Pemerintah terus mendorong agar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia bisa memasuki ekosistem digital pada 2022. Kementrian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM yang telah memasuki ekosistem tersebut mencapai 20,76 juta unit. Jumlah tersebut meningkat 26,6% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 16,4 juta UMKM, ini berarti sudah ada 32,44% dari 64 juta unit UMKM yang telah memasuki ekosistem digital.

Sejak lembaga-lembaga mikrofinansial mulai muncul sebagai motor penggerak inovasi sosial, riset tentang “*sociotecnopreneur*” wirausaha sosial berbasis teknologi telah menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama. Salah satu penelitian awal di Indonesia, yang dikerjakan oleh Neliti, menyoroti peran Bina Swadaya sebagai social business case study. Lewat rangkaian program pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan mikro, Bina Swadaya berhasil membantu ribuan keluarga keluar dari garis kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa keterpaduan layanan keuangan dengan

pendampingan intensif menciptakan ekosistem dukungan yang lebih kokoh daripada skim kredit konvensional semata menghasilkan peningkatan pendapatan rata-rata penerima hingga 30 % dalam dua tahun pertama (Putri, 2017)

Kemajuan teknologi digital kemudian membuka perspektif baru. Studi terkini menegaskan bagaimana dompet elektronik dan transfer tunai berbasis aplikasi dapat mempercepat penyaluran bantuan sosial, mengurangi kebocoran anggaran, dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Di Thailand, lebih dari 14,5 juta penerima manfaat program kesejahteraan kini menerima bantuan langsung melalui dompet digital; Indonesia pun menerapkan inisiatif serupa dalam beberapa pilot project pemerintah. Riset dari Profesional Muda Cendekia menambahkan bahwa ketersediaan sumber daya digital seperti *platform e-commerce* lokal dan jaringan *peer-to-peer lending* memungkinkan pelaku usaha kecil mendapatkan pasar lebih luas tanpa harus melalui rantai distribusi tradisional, sehingga mengerek pendapatan rumah tangga di zona rural hingga 20 %.

Namun, riset kualitatif di berbagai desa menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar membangun platform teknologi, melainkan menumbuhkan kapabilitas digital dan kewirausahaan pada komunitas marjinal. Analisis dalam jurnal terkini menemukan bahwa tanpa pelatihan literasi digital dan pendampingan lapangan, banyak *sociotecnopreneur* yang gagap mengelola aplikasi atau memahami risiko bisnis online. Hal ini menyebabkan sebagian inisiatif padam sebelum mencapai skala ekonomi yang cukup untuk mandiri.

Lebih jauh, studi perbandingan internasional menyoroti bahwa transisi dari subsidi baik hibah pemerintah maupun dana CSR ke model bisnis yang berkelanjutan belum banyak dijumpai oleh penelitian terapan. Sebagian besar *startup* sosial di negara berkembang masih bergantung pada infus modal lunak; saat aliran dana kering, operasi mereka terancam berhenti. Riset lanjutan antara universitas dan inkubator bisnis menekankan pentingnya rancangan “*hybrid value chain*” yang adaptif: memadukan sumber pendapatan komersial dengan mekanisme redistribusi keuntungan untuk komunitas.

Dengan semakin majunya teknologi, dialog antar-peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan menjadi kunci. Tantangannya kini bergeser pada bagaimana menerjemahkan temuan riset ke dalam kebijakan inklusif mulai dari regulasi fintech yang ramah bagi usaha mikro hingga program pelatihan massal berbasis AI. Hanya lewat sinergi riset yang mendalam dan implementasi terukur, kekuatan *sociotecnopreneur* dapat benar-benar mengangkat jutaan keluarga keluar dari kemiskinan. (Abdulgani & Mantikayan, 2017)

Mengurai benang kusut kemiskinan lewat lensa *sociotecnopreneurship* sesungguhnya memerlukan perpaduan jalinan teknologi, semangat kewirausahaan, dan kekuatan komunitas. Bayangkan seorang fasilitator digital yang tiba di sebuah desa terpencil; bukan sekadar membawa gadget atau aplikasi, melainkan juga membuka pintu akses pengetahuan dan kepercayaan diri. Melalui program pelatihan interaktif, warga diajak memetakan potensi lokal apakah itu kerajinan tenun, hasil tani, atau jasa pariwisata desa lalu belajar bagaimana memanfaatkan *platform e-commerce* untuk menembus pasar lebih luas. Proses ini tidak berhenti pada tutorial teknis semata; peserta didorong untuk merancang model bisnis kecil yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan kemanfaatan sosial, sambil tetap menyusun proyeksi keuangan sederhana agar usaha dapat tumbuh mandiri.

Ketika fondasi kapabilitas digital mulai terbangun, langkah selanjutnya adalah merakit “*hybrid value chain*” yang menautkan modal komersial dengan aliran dana sosial. Misalnya, koperasi online desa dapat bermitra dengan investor *impact fund* untuk mendapatkan suntikan modal kerja, sekaligus menyalurkan sebagian laba sebagai dana bergulir untuk keluarga paling rentan. Dalam praktiknya, mekanisme ini bisa berbentuk platform *peer-to-peer lending* yang transparan: warga meminjam dengan suku bunga rendah, dan keuntungan tetap mengalir kembali ke komunitas dalam wujud beasiswa pendidikan

atau perbaikan infrastruktur dasar. Skema seperti ini tumbuh produktif karena setiap anggota tahu bahwa keberhasilan satu usaha sekaligus menjadi tuah bagi banyak pihak (Pratiwi et al., 2022).

Tak kalah penting, kebijakan lokal dan dukungan pemerintah mesti beradaptasi dengan ritme teknologi. Regulasi fintech, misalnya, perlu menyiapkan payung hukum yang memudahkan pendaftaran usaha mikro digital, melonggarkan persyaratan kredit kecil, sekaligus menjamin perlindungan data pengguna. Di sinilah riset terapan memainkan peran penting: menelaah hambatan birokrasi yang kerap memupus inisiatif muda, lalu merumuskan rekomendasi konkret mulai dari simplifikasi izin usaha online, hingga insentif pajak bagi startup sosial yang berhasil mengangkat minimal 100 keluarga keluar dari garis kemiskinan.

Namun, semua rencana tak akan sekuat niat tanpa “*co-creation*” bersama masyarakat. Pendekatan *top-down*, di mana teknologi dipaksakan tanpa mendengar aspirasi lokal, mudah menimbulkan resistensi. Sebaliknya, model yang berakar dari forum warga di mana ide, kritik, dan solusi didiskusikan bersama menumbuhkan rasa kepemilikan. Contohnya, di beberapa desa pilot program, pendamping bukan hanya mengajar penggunaan aplikasi, tetapi juga memfasilitasi kelompok diskusi bulanan untuk mengevaluasi kemajuan, kendala operasional, dan peluang skalabilitas. Lewat dialog berkelanjutan, *platform* digital pun terus disempurnakan agar selaras dengan konteks budaya dan kebutuhan sehari-hari (Abdulgani & Mantikayan, 2017).

Akhirnya, untuk memastikan kesinambungan, setiap langkah harus diukur dengan metrik yang berorientasi pada perubahan riil bukan sekadar jumlah unduhan aplikasi atau volume penjualan. Para peneliti merekomendasikan indikator ganda: indikator ekonomi (pertumbuhan pendapatan rumah tangga, tingkat tabungan) dan indikator sosial (akses sekolah anak, kesehatan keluarga, partisipasi perempuan dalam usaha). Data yang diolah secara transparan kemudian dipublikasikan dalam laporan komunitas, memicu semangat kompetisi sehat antar desa. Dengan begitu, *sociotecnopreneurship* tak hanya menjadi wacana ideal, melainkan gerakan kolektif yang membuka jalan bagi setiap lapisan masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan berkembang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan *sociotecnopreneur* membuktikan diri sebagai model yang lebih holistik daripada intervensi ekonomi tradisional. Integrasi kapabilitas digital dengan pelatihan kewirausahaan memberdayakan pelaku usaha mikro untuk memasuki pasar daring dan mengelola usaha secara mandiri. Pendampingan intensif dengan rasio mentor:mentee yang rendah memastikan solusi cepat atas persoalan teknis dan bisnis, sekaligus memupuk rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri. Sementara itu, model pendanaan hibrida seperti *revolving fund* menciptakan siklus modal berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada hibah eksternal. Terakhir, pengukuran dampak multidimensi (ekonomi dan non-ekonomi) memastikan bahwa program tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendorong akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial keluarga.

Saran

1. Memperluas Program Literasi dan Pelatihan Digital

Pemerintah dan lembaga swadaya harus memperbanyak pusat pelatihan digital bergerak (*mobile lab*) serta modul *e-learning* yang dikombinasikan dengan sesi tatap muka, agar pelaku usaha di daerah terpencil semakin siap memanfaatkan teknologi.

2. Memperkuat Jaringan Mentor-Mentee

Alokasikan dana khusus untuk pengembangan kapasitas mentor, termasuk insentif bagi praktisi berpengalaman. Buat standar pelatihan mentor agar kualitas *coaching* tetap terjaga saat program diperluas ke berbagai wilayah.

3. Mengembangkan Kebijakan Fintech Inklusif

Rancang regulasi yang menyeimbangkan perlindungan konsumen mikro dengan insentif investasi; misalnya, batas biaya transaksi rendah, subsidi bunga pinjaman, dan kemudahan dokumen untuk pelaku usaha informal.

4. Memperluas Skema Pendanaan Hibrida

Dorong lembaga keuangan syariah dan koperasi untuk mengadopsi model revolving fund dan skema bagi hasil, agar modal dapat terus mengalir tanpa beban bunga berlebihan. Fasilitasi kerjasama dengan sektor swasta melalui CSR yang diarahkan pada program pengentasan kemiskinan.

Dengan menggabungkan rekomendasi-rekomendasi di atas, ekosistem *sociotecnopreneur* akan semakin kokoh, berkelanjutan, dan inklusif mewujudkan harapan jutaan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menuju kemandirian yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, M. A., & Mantikayan, J. M. (2017). Exploring Factors that Affect Technopreneurship: A Literature Review Tools for Researchers View project Factors that Affect Technopreneurship: A Meta Analysis View project. *CCSPC R&D Journal*, 1(2), 98–114. <https://www.researchgate.net/publication/327542134>
- Akter, A., Ramli, A. J., Ahmad, Y., & Rana, S. M. S. (2017). Social Entrepreneurship: A Roadmap to Reach Out Poverty. *International Journal of Business and Technopreneurship*, 7(1), 77–86.
- Fowosire, R. A., Elijah, O., & Fowosire, R. (2017). Technopreneurship: A View of Technology, Innovations and Entrepreneurship. *Global Journal of Researches in Engineering: F Electrical and Electronics Engineering*, 17(7), 41–46.
- Muriithi, D. S. M. (2017). Microfintech : Outreaching Financial Inclusion With Cost-Cutting Innovation. *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences*, 5(1), 36–48.
- Pratiwi, C. P., Sasongko, A. H., Aguzman, G., Wibawa, R. C., & Pambudy, R. (2022). *Characteristics And Challenge Faced By Socio-Technopreneur In Indonesia*. 3(1), 13–22.
- Putri, L. I. (2017). Reduksi Kemiskinan Melalui Sociopreneurship. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 6(1), 58.
- Rachmawati, M. (2020). Kontribusi Sektor UMKM pada Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(7), 1–13.
- Rokhman, W. (2013). The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation: Study in Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 11(3), 21–30. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/10419/193826>
- Sopah, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax Idea*, 2(6), 26–40.
- Yusriadi, Y., Tahir, S. Z. bin, Awaluddin, M., & Misnawati, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan melalui Socialpreneur. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 115–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2529>